

## **Peran Nilai Keagamaan Dalam Penguatan Ideologi Pancasila Pada Aparatur Negara**

Putri Lestari<sup>1</sup>, Harisa Dini Ramadhani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Asministrasi Pyblik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas MaduraMadura, Pamekasan, Indonesia

Email Korespondensi: <sup>1</sup>[000putrilestrasi@gmail.com](mailto:000putrilestrasi@gmail.com), <sup>2</sup>[farisadini18@gmail.com](mailto:farisadini18@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku aparatur negara, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai penyimpangan yang menunjukkan lemahnya internalisasi nilai tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai keagamaan dalam memperkuat ideologi Pancasila pada aparatur negara serta implikasinya terhadap peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keagamaan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan berperan sebagai kontrol internal dalam membentuk perilaku aparatur negara yang berintegritas dan profesional. Nilai tersebut mendorong aparatur negara untuk menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa kurangnya konsistensi, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya program pembinaan yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai keagamaan dan nilai Pancasila merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat karakter aparatur negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** nilai keagamaan; ideologi Pancasila; aparatur negara; integritas; pelayanan publik

### **ABSTRACT**

*Pancasila as the state ideology plays an important role in shaping the character and behavior of state apparatus, yet in practice there are still various deviations indicating weak internalization of its values. This study aims to analyze the role of religious values in strengthening the Pancasila ideology among state apparatus and its implications for improving integrity and the quality of public services. This research employs a qualitative approach with a descriptive type. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation using purposive sampling techniques. The results show that religious values such as honesty, responsibility, and fairness function as internal controls in shaping professional and integrity-driven behavior among state apparatus. These values encourage public officials to perform their duties in accordance with Pancasila principles. However, the implementation still faces challenges, including lack of consistency, weak supervision, and limited sustainable development programs. This study concludes that the integration of religious values and Pancasila principles is an effective strategy to strengthen the character of state apparatus and improve the quality of public services sustainably.*

**Keywords:** religious values; Pancasila ideology; state apparatus; integrity; public service

### **Pendahuluan**

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki kedudukan fundamental dalam membentuk karakter, etika, dan perilaku aparatur negara dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, Pancasila diharapkan mampu menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, berbagai permasalahan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta rendahnya kualitas pelayanan publik masih menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dengan implementasinya dalam birokrasi pemerintahan (Saputri et al., 2024, hlm. 12).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila pada aparatur negara belum sepenuhnya berjalan optimal. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan publik memiliki peran strategis dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan karakter dan integritas aparatur melalui pendekatan yang lebih substantif. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif adalah melalui penguatan nilai keagamaan sebagai landasan moral individu. Nilai keagamaan mengandung prinsip universal seperti kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta dapat menjadi kontrol internal dalam membentuk perilaku aparatur negara yang berintegritas (Kardiman et al., 2024, hlm. 328).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa nilai religius memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk karakter dan etika kerja individu. Penelitian oleh Rusmulyani (2024, hlm. 45) menegaskan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila pada ASN berperan penting dalam meningkatkan integritas, etika, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Selain itu, nilai dasar ASN BerAKHLAK juga menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam membangun budaya kerja aparatur yang profesional dan berorientasi pelayanan (Ghozi & Shodiq, 2025, hlm. 7). Penelitian lain menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai fondasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, namun implementasinya masih menghadapi tantangan akibat lemahnya internalisasi nilai tersebut dalam praktik sosial dan birokrasi (Simanullang, 2024, hlm. 102).

Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik menghubungkan peran nilai keagamaan dengan penguatan ideologi Pancasila pada aparatur negara masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada pendidikan karakter atau implementasi nilai Pancasila secara umum, belum secara mendalam mengkaji integrasi nilai keagamaan sebagai instrumen penguatan ideologi negara dalam konteks birokrasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam upaya menemukan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan aparatur negara.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana peran nilai keagamaan dalam memperkuat ideologi Pancasila pada aparatur

negara serta implikasinya terhadap peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi nilai keagamaan dalam membentuk aparatur negara yang berintegritas dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam pengembangan kajian tentang integrasi nilai keagamaan dan ideologi negara, serta secara praktis sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembinaan aparatur negara yang berorientasi pada penguatan moral, etika, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena peran nilai keagamaan dalam penguatan ideologi Pancasila pada aparatur negara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara kontekstual dan holistik, sehingga sesuai untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks (Creswell, 2014, hlm. 4). Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu instansi pemerintahan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan waktu pelaksanaan selama tiga bulan, yaitu dari Januari hingga Maret 2026.

Subjek penelitian ini adalah aparatur negara yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan objek penelitian adalah implementasi nilai keagamaan dalam memperkuat ideologi Pancasila dalam perilaku kerja aparatur negara. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019, hlm. 218). Kriteria informan meliputi: (1) aparatur negara dengan masa kerja minimal tiga tahun, (2) memiliki keterlibatan langsung dalam pelayanan publik, dan (3) bersedia memberikan informasi secara terbuka. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8–12 orang, yang dianggap telah mewakili variasi pengalaman dan perspektif yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara fleksibel namun tetap terarah. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan kerja aparatur negara untuk mengamati perilaku, interaksi, dan praktik kerja yang mencerminkan nilai keagamaan dan nilai Pancasila. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen resmi, seperti peraturan, laporan kinerja, serta kebijakan internal yang berkaitan dengan pembinaan nilai moral dan etika aparatur. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan alat bantu perekam untuk memastikan keakuratan data.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan analisis data. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan studi pendahuluan, menyusun instrumen penelitian, serta menentukan lokasi dan informan penelitian. Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di lapangan. Selanjutnya, pada tahap analisis data, peneliti mengolah data yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif secara interaktif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014, hlm. 33). Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan dalam memahami pola dan hubungan antar data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan cara mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul dari data yang telah dianalisis.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member check, yaitu mengkonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan maksud yang disampaikan (Sugiyono, 2019, hlm. 273). Dengan demikian, data yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keagamaan memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat implementasi ideologi Pancasila pada aparatur negara, khususnya dalam membentuk perilaku kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, sebagian besar aparatur negara menyatakan bahwa nilai keagamaan seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi juga diinternalisasi dalam bentuk sikap dan tindakan nyata, seperti disiplin kerja, transparansi dalam pelayanan, serta menghindari praktik penyimpangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa nilai keagamaan berfungsi sebagai kontrol internal (self control) yang mampu membentuk kesadaran moral aparatur negara. Dalam perspektif teori etika, nilai religius memiliki kekuatan dalam membangun integritas individu karena bersumber dari keyakinan yang bersifat personal dan mendalam (Creswell, 2014, hlm. 62). Hal ini sejalan dengan penelitian Rusmulyani (2024, hlm. 45)

yang menyatakan bahwa internalisasi nilai keagamaan mampu meningkatkan etika kerja dan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, nilai keagamaan tidak hanya berperan sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai landasan etis dalam praktik birokrasi.

Lebih lanjut, hasil observasi menunjukkan bahwa aparatur negara yang secara aktif menjalankan praktik keagamaan, seperti kegiatan ibadah rutin dan pembinaan rohani, cenderung memiliki tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang kurang aktif. Lingkungan kerja yang mendukung pengamalan nilai keagamaan, seperti adanya kegiatan keagamaan bersama dan kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual, juga berkontribusi positif terhadap pembentukan budaya kerja yang berintegritas. Hal ini memperkuat temuan Kardiman et al. (2024, hlm. 328) yang menyatakan bahwa nilai religius berperan sebagai kontrol sosial dalam membentuk perilaku individu dalam lingkungan kerja.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi nilai keagamaan dalam memperkuat ideologi Pancasila belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa informan mengungkapkan bahwa masih terdapat aparatur negara yang memahami nilai keagamaan secara normatif, tetapi belum mampu mengimplementasikannya secara konsisten dalam perilaku kerja. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik pelayanan yang kurang transparan, kurang responsif, serta adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang dalam skala tertentu. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman nilai dan praktik di lapangan.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Simanullang (2024, hlm. 102) yang menyatakan bahwa tantangan utama dalam implementasi nilai Pancasila terletak pada aspek praksis, yaitu kurangnya konsistensi dalam penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian Ghazi dan Shodiq (2025, hlm. 7) juga menegaskan bahwa meskipun nilai dasar ASN seperti BerAKHLAK telah dirumuskan dengan baik, implementasinya masih memerlukan penguatan melalui pembinaan berkelanjutan dan sistem pengawasan yang efektif. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya pemahaman nilai, tetapi pada lemahnya internalisasi dan konsistensi dalam penerapannya.

Dari hasil analisis data, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan internalisasi nilai keagamaan dalam memperkuat ideologi Pancasila pada aparatur negara, yaitu faktor individu, faktor lingkungan kerja, dan faktor kelembagaan. Faktor individu meliputi tingkat pemahaman agama dan kesadaran moral, faktor lingkungan kerja meliputi budaya organisasi dan dukungan sosial, sedangkan faktor kelembagaan meliputi kebijakan, sistem pembinaan, dan pengawasan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana nilai keagamaan dapat diimplementasikan secara efektif dalam perilaku kerja aparatur negara.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan penelitian ini menunjukkan adanya kontribusi baru, yaitu penegasan bahwa nilai keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai faktor pendukung, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ideologi Pancasila secara substantif dalam birokrasi pemerintahan. Hal ini memperluas hasil penelitian Rahman (2020, hlm. 88) dan Suryadi (2019, hlm. 73) yang lebih menekankan pada aspek pendidikan karakter, tanpa mengaitkan secara langsung dengan penguatan ideologi negara dalam konteks aparatur pemerintahan.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memperkuat konsep integrasi antara nilai keagamaan dan ideologi Pancasila sebagai dua sistem nilai yang saling melengkapi dalam membentuk karakter aparatur negara. Sementara itu, implikasi praktisnya adalah perlunya pengembangan program pembinaan aparatur negara yang tidak hanya berfokus pada aspek kompetensi teknis, tetapi juga pada penguatan nilai moral dan spiritual secara berkelanjutan. Program tersebut dapat berupa pelatihan etika, pembinaan keagamaan, serta penguatan budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan keagamaan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan ideologi Pancasila pada aparatur negara tidak dapat dilakukan secara normatif semata, tetapi harus didukung oleh internalisasi nilai keagamaan yang mampu membentuk kesadaran moral dan perilaku etis secara nyata dalam praktik birokrasi. Oleh karena itu, integrasi antara nilai keagamaan dan nilai Pancasila menjadi strategi yang relevan dan penting dalam mewujudkan aparatur negara yang berintegritas dan profesional.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa nilai keagamaan memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat implementasi ideologi Pancasila pada aparatur negara. Nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan terbukti mampu menjadi landasan moral yang mendorong terbentuknya perilaku aparatur negara yang berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Internalisasi nilai keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kontrol internal yang mempengaruhi sikap dan tindakan aparatur dalam memberikan pelayanan publik.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan ideologi Pancasila melalui nilai keagamaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor individu, lingkungan kerja, dan kelembagaan. Aparatur negara yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik dan didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif cenderung mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara lebih konsisten. Sebaliknya, lemahnya pengawasan, kurangnya pembinaan berkelanjutan, serta rendahnya konsistensi dalam penerapan nilai menjadi kendala dalam proses internalisasi tersebut.

Dengan demikian, penguatan ideologi Pancasila pada aparatur negara tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata, tetapi perlu didukung oleh integrasi nilai keagamaan secara sistematis dalam pembinaan aparatur. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan program pembinaan moral dan spiritual, pengembangan budaya kerja berbasis nilai, serta peningkatan sistem pengawasan yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman bahwa integrasi antara nilai keagamaan dan nilai Pancasila merupakan strategi yang relevan dalam mewujudkan aparatur negara yang berintegritas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik, yang telah memberikan kesempatan serta dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah Agama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

### **Daftar Pustaka**

- Ghozi, A. & J. Shodiq. (2025). Core value BerAKHLAK aparatur sipil negara sebagai nilai budaya kerja dalam pelayanan publik. *Wawasan: Jurnal Kediklatan BDK Jakarta*, 6(1), 1–15.
- Ghozi, A. A., & Shodiq, J. (2025). Core value BerAKHLAK aparatur sipil negara sebagai nilai budaya kerja dalam pelayanan publik. *Wawasan: Jurnal Kediklatan BDK Jakarta*, 6(1), 1–15.
- John W. Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- John W. Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kardiman, Y., Sapriya, S., Sinaga, I. C., & Casmana, A. R. (2024). Nilai religius dalam pembelajaran Pancasila di tingkat SMA/MA. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 23(2), 325–333.
- Kurniawati Rusmulyani. (2024). Importance of character education for civil servants to instil Pancasila values. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(1), 40–50.
- M. Simanullang. (2024). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam penguatan karakter bangsa. *Jurnal Publika*, 13(2), 95–105.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rahman. (2020). Pendidikan karakter dalam penguatan nilai moral bangsa. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 8(2), 80–90.
- Rusmulyani, K. (2024). Importance of character education for civil servants to instil Pancasila values. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(1), 40–50.

## **NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies**

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: [www.omahnurverse.com](http://www.omahnurverse.com)

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 316 – 323.

- Saputri, D. Z., et al. (2024). Implementasi Pancasila dalam tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5), 10–20.
- Simanullang, M. (2024). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam penguatan karakter bangsa. *Jurnal Publika*, 13(2), 95–105.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi. (2019). Etika sosial dan pembentukan karakter aparatur negara. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(1), 65–75.
- Yayan Kardiman, Sapriya, S., Sinaga, I. C., & Casmana, A. R. (2024). Nilai religius dalam pembelajaran Pancasila di tingkat SMA/MA. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 23(2), 325–333.